

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Apriani Rani dan , A. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- A. Z. Nasution,(2002). *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media
- Barkatullah A. H., (2009)., *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta
- B. H. Abdul.(2017). *Hukum Transaksi Elektronik sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*. Nusa Media.
- Hadjon, P. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Kurniawan. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*. Malang: Penerbit Elektronik Pertama dan Terbesar di Indonesia.
- L. Nining. (2023). *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*. Depok: PNJ Press.
- Mamudji Sri dan, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Miru, A. (2011). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: PT. Visimedia.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nurbani Septiana dan, H. (2017). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, E. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, L. (2012). *Hukum Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Sasongko, W. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- S. Husin S, I. S Neni.(2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. CV. Mandar Majis, Cetakan I
- Sidharta, B. A. (1999). *Peranan Praktisi Hukum Dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Bandung: Pusat Penelitian perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- N. Widi, E, Mira.(2017). *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*. CV Pustaka Bengawan.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dagang Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Purwosutjipto, H. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.
- Widagdo, S. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka.
- Y. Ahmad dan, W. (2008). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Purwosutjipto, H. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia III: Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan.

B. Jurnal

- Kurniawan. (2011). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan Dan Kendala-Kendala BPSK). *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 334.
- Putu Inten Kanaya, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pembatalan Tiket Keberangkatan Pengangkutan Udara Akibat Pandemi COVID-19*, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3.
- Suryawan, A. G. (2017). Perlindungan Konsumen Sebagai Pengguna Jasa Penerbangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2.
- W. S Wiwik, T. K. Edy (2020). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Iklan Kosmetik Menyesatkan*. Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat, Volume 6, 81.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP 71/2019”)
- Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia [https:// kbbi.web.id/identifikasi](https://kbbi.web.id/identifikasi) diakses pada tanggal 23 September 2023

Polewali Mandar, 2014, “Status Hukum”, Serial Blog, URL: [http://statushukum.com/tentang- status-hukum](http://statushukum.com/tentang-status-hukum) Diakses Pada tanggal 29 Oktober 2023

M. Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Perss), hlm 133

[http://www.Pengertian Ahli. Com /2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan. Html #](http://www.Pengertian-Ahli.Com/2014/01/Pengertian-Keadilan-Apa-Itu-Keadilan.Html#). Di akses pada tanggal 29 Oktober 2023

[https:// bpkn.go.id/page/ tugas-dan-fungsi](https://bpkn.go.id/page/tugas-dan-fungsi), diakses pada 29 Oktober 2023

